Potensi Pelelangan Ikan di Kabupaten Barru Sebagai Upaya dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Maritim

Arvito Amar¹, Imam Fadhil Nugraha²

arvitovito84@gmail.com¹, imamfadhil86@gmail.com²

^{1,2}Dapertemen Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin, Makassar, Indonesia

Abstract: *Fish auctions are an economic activity that has great potential in encouraging maritime economic growth. A fish auctions is the buying and selling of fish and marine products located at the port or fishing pier. Barru Regency is an example of an area on South Sulawesi Island that has enormous maritime potential because of its large and abundant marine resources. In this case, the Barru Regency Government is trying to encourage maritime economic growth by establishing strategic policies to encourage maritime economic growth, one of which is the fish auction site, as a potential locations for the maritime economy growth. With the majority of its population being fishermen, Barru Regency certainly has several fish auction locations spread across various points as objects of maritime economic growth.*

Keywords : *Potential, Economic Growth Efforts, Maritime Economic, Barru*

Abstrak: Pelelangan ikan merupakan salah satu kegiatan ekonomi yang memiliki potensi besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi maritim, pelelangan ikan adalah kegiatan jual beli ikan dan hasil laut yang berlokasi di pelabuhan atau dermaga perikanan. Kabupaten barru yang merupakan contoh daerah di pulau sulawesi selatan yang memiliki potensi maritim yang begitu besar karena kekayaan laut yang besar dan melimpah. Dalam hal itu pemerintah kabupaten barru berupaya mendorong pertumbuhan ekonomi maritim dengan menentukan strategis sebagai kebijakan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah salah satunya memperhatikan berbagai potensi pertumbuhan salah satunya tempat pelelangan ikan, sebagai lokasi potensi pertumbuhan ekonomi maritim. Dengan penduduknya sebagian besar adalah nelayan, kabupaten barru tentunya memiliki beberapa lokasi pelelangan ikan yang tersebar di berbagai titik sebagai objek pertumbuhan ekonomi maritim.

Kata Kunci : Potensi, Upaya Pertumbuhan Ekonomi, Ekonomi Maritim, Barru

1. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang diapit oleh dua Samudera yaitu Samudera Hindia dan Samudera Pasifik. Selain diapit oleh dua Samudera indonesia juga diapit oleh dua Benua yaitu Benua Asia di sebelah barat laut dan Benua Australia di sebelah tenggara, memiliki banyak pulau kecil dan pulau besar yang terbentang dari sabang sampai merauke dan Miangas sampai pulau Rote. Negara Indonesia merupakan negara maritim terbesar di dunia karena kepulauannya dipisahkan oleh laut. Dengan luas lautnya mencapai sekitar 5,8 juta km² dengan garis pantai sepanjang 81.00 km yang merupakan garis pantai produktif terpanjang kedua di dunia berdasarkan hasil konvensi *United Nation Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS) atau hukum laut internasional pada tanggal 10 desember 1982 di Montego Bay, Jamaica menetapkan wilayah laut indonesia dengan luas 3.257.357 km², dengan batas teritorial dari garis dasar kontinen sejauh 12 mil dan luas daratannya mencapai 1.919.443 km², secara menyeluruh luas wilayah lautan dan daratan

mencapai 5.176.800 (Saksono H, 2013:1) kutipan tersebut menegaskan bahwa Indonesia adalah Negara Maritim terbesar di dunia karena memiliki luas wilayah laut yang signifikan dibandingkan luas daratannya. Selain itu, posisi geografisnya yang terdiri dari pulau-pulau dan dikelilingi lautan memperkuat statusnya sebagai Negara maritim.

Luas wilayah laut yang dimiliki tentunya membutuhkan manajemen pengelolaan yang tepat dan baik. Saat ini Indonesia masih belum bisa memanfaatkan potensi kelautannya dengan baik karena besarnya nilai kerugian yang diakibatkan oleh maraknya pencurian ikan, pengelolaan potensi kelautan di daerah-daerah kepulauan saat ini sangat memprihatinkan karena nampaknya belum didukung inovasi yang di kolaborasikan dengan kearifan lokal yang di dorong oleh partisipasi masyarakat. Mengutip dari Kementerian Perikanan dan Kelautan Republik Indonesia (KKP) RI, potensi sumber daya ikan laut di Indonesia ditaksir 12,54 juta ton/ tahun yang tersebar dari perairan wilayah Indonesia dan perairan Zona Ekonomi Eksklusif (KKP RI, 2022) kutipan tersebut menyoroti potensi besar yang dimiliki Indonesia dalam sektor perikanan laut, Potensi besar ini pastinya menuntut pengelolaan yang bijak dan berkelanjutan. Eksploitasi yang berlebihan atau penangkapan ikan yang tidak terkendali akan merusak ekosistem laut dan mengancam populasi ikan di masa depan. Solusi yang tepat yang dapat dilakukan Indonesia saat ini yaitu mengembangkan Sains dalam pengelolaan sumber daya laut, seperti menetapkan kuota tangkap berkelanjutan, memperkuat pengawasan terhadap praktik penangkapan ilegal, serta menggalakkan program pemulihan dan rehabilitasi ekosistem laut. Selain itu, peningkatan kesejahteraan SDM dalam hal ini nelayan lokal melalui pelatihan dan dukungan teknologi dapat memastikan bahwa mereka mampu menangkap ikan dengan cara yang berkelanjutan dan efisien. Dengan begitu pengelolaan kekayaan laut Indonesia dapat dimanfaatkan secara optimal tanpa merusak ekosistem yang mendukungnya. Luas terumbu karang mencapai 25.000 km² dan memiliki 555 spesies rumput laut, 950 spesies biota terumbu karang, serta memiliki 8.500 spesies ikan (Kompas. com, 2020) Hal tersebut menunjukkan betapa kayanya biodiversitas laut Indonesia, terutama dari segi terumbu karang, rumput laut, dan berbagai spesies biota laut yang hidup di dalamnya. Keanekaragaman tersebut bukan hanya menjadi aset lingkungan, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi, sosial, dan budaya bagi masyarakat, terutama yang tinggal di kawasan pesisir. Negara Indonesia merupakan negara dengan luas laut terbesar yang memiliki potensi untuk di manfaatkan demi kesejahteraan khususnya masyarakat nelayan. Tentunya ini merupakan keuntungan besar bagi Indonesia sebagai negara maritim dimana di sektor perikanan dan kelautan bisa menjadi faktor yang meningkatkan perekonomian Indonesia.

Sulawesi Selatan merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang terdiri dari 21 kabupaten dan tiga kota di dalamnya yang juga merupakan salah satu daerah pesisir di Indonesia yang masyarakatnya sebagian besar berprofesi sebagai nelayan. Komoditi unggulan Provinsi Sulawesi Selatan khususnya Kabupaten Barru, adalah bidang perikanan tangkap. Terdapat banyak kelompok masyarakat di Sulawesi Selatan yang mata pencaharian utamanya adalah nelayan atau menggantungkan hidupnya pada laut salah satu daerah di Sulawesi Selatan yang menjadikan sektor kelautan dan perikanan sebagai andalan pertumbuhan ekonomi masyarakatnya adalah kabupaten Barru, wilayah kabupaten Barru memiliki luas wilayah 1.174,72 km² dengan luas wilayah penangkapan ikan laut sekitar 56.160 Ha (Jafar N et al, 2019:176) Luasnya wilayah penangkapan ikan ini memberi kesempatan bagi masyarakat pesisir Kabupaten Barru untuk memanfaatkan sumber daya laut sebagai sumber ekonomi, sekaligus berperan dalam memenuhi kebutuhan pangan lokal dan mendukung ketahanan pangan. Bagi sebagian warga Kabupaten Barru, sumber daya laut berupa ikan dan hasil laut lainnya merupakan potensi ekonomi yang sangat penting bagi kehidupan masyarakat setempat. Begitu pula yang tinggal dan beraktivitas di kawasan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) atau masyarakat kabupaten Barru lebih familiar dengan istilah “Lelong”. Tempat Pelelangan Ikan (TPI) atau Lelong merupakan sarana yang penting bagi kelangsungan hidup masyarakat, khususnya bagi para nelayan yang dimana Lelong merupakan tempat mereka mencari nafkah. (M. Syaiful, 2020:2).

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS, 2021) Kabupaten Barru merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan yang memiliki potensi kelautan dan perikanan yang potensial, nilai produksi perikanan wilayah ini pada tahun 2020 tercatat Rp410.001.332.000,- memberikan kontribusi sebesar 4,57% bagi produksi perikanan Provinsi Sulawesi Selatan (Gunawan et al, 2022:116) Angka ini menunjukkan bahwa Kabupaten Barru memiliki potensi kelautan dan perikanan yang besar dan dapat menjadi motor penggerak ekonomi lokal dan sumber pendapatan bagi masyarakat pesisir terutama nelayan. Dalam hal ini juga menjadi faktor pendorong ekonomi maritim bagi Kabupaten Barru. Peran TPI dalam mendorong pertumbuhan ekonomi maritim karena TPI menyediakan akses bagi para nelayan untuk menjual hasil tangkapannya kepada konsumen dan pedagang, dengan adanya TPI di suatu daerah dapat membantu terjaminnya kesegaran dan kualitas ikan yang akan dijual yang tentunya dapat meningkatkan daya saing produk perikanan daerah. Pemerintah kabupaten Barru telah melakukan pengembangan TPI yang menjadi salah satu fokus utama dalam peningkatan di sektor perikanan. Kebijakan yang mendukung pengelolaan dan pengembangan TPI, seperti pelatihan bagi nelayan dan peningkatan infrastruktur, dapat

membantu meningkatkan kapasitas nelayan dalam menangkap ikan serta memperbaiki sistem pemasaran hasil tangkapan. Hal ini akan berdampak positif terhadap pendapatan nelayan dan kesejahteraan masyarakat setempat. Selain itu, keberadaan TPI yang terintegrasi dengan industri pengolahan dan pemasaran produk perikanan dapat mendorong diversifikasi produk, sehingga meningkatkan nilai tambah bagi hasil perikanan.

Secara konseptual tempat pelelangan ikan disediakan oleh pemerintah untuk membantu nelayan dalam memasarkan hasil tangkapannya. Pelelangan ikan merupakan tempat transaksi jual beli sehingga harga ikan menjadi lebih tinggi dan stabil serta memberikan keuntungan bagi nelayan (Hernawati D et al, 2018:70) Tempat pelelangan ikan tidak hanya sekedar tempat transaksi jual beli saja, tetapi juga dapat menjadi pusat integrasi antara sektor perikanan tangkap dan industri pengolahan serta pemasaran. Hal ini membuka peluang untuk diversifikasi produk perikanan yang pada akhirnya menambah nilai ekonomi dari hasil tangkapan. Dengan pengolahan yang terintegrasi di dekat TPI, produk ikan segera dapat diolah menjadi produk bernilai tambah seperti ikan kaleng, ikan asap, atau produk olahan lainnya, sehingga memperluas pasar dan meningkatkan keuntungan bagi nelayan dan pengusaha lokal. Potensi ini sangat penting dalam konteks pembangunan ekonomi maritim yang berkelanjutan, di mana keseluruhan ekosistem perikanan dapat dikelola dengan baik tanpa merusak sumber daya alam. Dengan demikian, potensi pelelangan ikan di Kabupaten Barru tidak hanya berkontribusi terhadap perekonomian lokal, tetapi juga menjadi bagian dari upaya besar dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Melalui pengembangan dan pengelolaan yang baik, diharapkan sektor perikanan di Kabupaten Barru dapat menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi maritim yang berkelanjutan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta menjaga kelestarian sumber daya laut.

Dalam penelitian ini Kabupaten Barru memiliki banyak sekali potensi sumber daya kelautan yang melimpah. Dengan menganalisis secara detail mengenai sistem pelelangan ikan yang ada, termasuk proses, infrastruktur, keberlanjutan, dan efisiensi penelitian dapat memberikan wawasan yang mendalam tentang bagaimana pelelangan ikan dapat dioptimalkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir serta kontribusi sektor kelautan terhadap pertumbuhan ekonomi lokal. Selain itu, pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi pelelangan ikan di Kabupaten Barru juga dapat membantu dalam merancang kebijakan yang mendukung pengembangan sektor kelautan secara berkelanjutan dan berdaya saing tinggi, sehingga dapat memberikan dampak positif yang signifikan bagi pembangunan ekonomi maritim di wilayah tersebut. Selain itu, memahami bagaimana optimalisasi TPI

dapat memberikan dampak signifikan terhadap perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat adalah langkah penting dalam upaya peningkatan ekonomi lokal.

Dalam kajian ini penulis akan memfokuskan pada beberapa aspek utama. Pertama, peran strategis TPI dalam mendukung perekonomian masyarakat nelayan di Kabupaten Barru. Kedua, pentingnya pengelolaan TPI yang efektif, termasuk kebijakan pemerintah daerah dalam menyediakan infrastruktur, pelatihan nelayan, dan pengembangan sistem pelelangan. Ketiga, tantangan yang di hadapi TPI di Kabupaten Barru. Dengan analisis yang komprehensif, kajian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai potensi TPI dalam mendorong ekonomi maritim yang berkelanjutan di Kabupaten Barru, serta rekomendasi kebijakan yang dapat diimplementasikan untuk mendukung pengembangan sektor perikanan secara menyeluruh.

Reviu Literatur

Peningkatan Tempat pelelangan ikan (TPI) memiliki dampak yang begitu besar terhadap pertumbuhan ekonomi maritim dan kesejahteraan masyarakat pesisir di Indonesia. TPI yang terorganisir dapat meningkatkan pendapatan nelayan melalui proses penjualan yang efisien juga dapat meningkatkan kualitas produk ikan yang ditawarkan. Dengan memperhatikan fasilitas pengelolaan dan kualitas tangkapan dapat meningkatkan daya persaingan pasar baik domestik maupun internasional. Dengan pengelolaan yang berkelanjutan TPI dapat membantu nelayan dan pedagang dalam meningkatkan perekonomian mereka, sehingga TPI menjadi salah satu pilar utama dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

Dalam hal ini penulis menemukan berbagai literatur yang membahas isu ini. Untuk lebih jauh mengkaji lebih dalam mengenai potensi tempat pelelangan ikan (TPI) di Kabupaten Barru ada tiga literatur yang penulis dapatkan. Literatur pertama yaitu penelitian yang dilakukan oleh Mukhlisa A. Ghaffar, Erna, dan Muh Sulaiman yang berjudul *Analisis rantai pasok hasil tangkapan di tempat pendaratan ikan (TPI) sumpang binangae Kecamatan Barru Kabupaten Barru*. dalam tulisannya, penulis menganalisis rantai pasok hasil tangkapan ikan di tempat pendaratan ikan di Sumpang binangae Kecamatan Barru Kabupaten Barru. Dalam penelitian tersebut mengungkapkan beberapa tantangan utama dalam rantai pasok ini, terutama ketidakmampuan nelayan dalam menjaga kontinuitas pasokan ikan dan lemahnya posisi tawar menawar mereka terhadap harga jual hasil tangkapan. Hal ini menyebabkan nelayan seringkali berada dalam posisi yang tidak menguntungkan. Penulis juga memiliki

solusi untuk mengatasi hal ini antara lain; penguatan lembaga keuangan nelayan melalui koperasi, penyediaan fasilitas penangkapan ikan yang memadai, dan pelatihan penanganan hasil tangkapan untuk menjaga kualitas produk sesuai dengan permintaan pasar (Ghaffar, Erna, & Sulaiman, 2022, p. 272). Dalam penilaian tersebut menunjukkan betapa pentingnya integrasi rantai pasok yang melibatkan nelayan, pedagang kecil, dan konsumen. Secara khusus dalam penelitian tersebut nelayan sering berada dalam posisi yang lemah dalam rantai pasok, mereka tidak hanya menghadapi ketidakpastian hasil tangkapan dan biaya operasional yang tinggi, tetapi juga memiliki daya tawar yang rendah terhadap harga jual. Dalam hal ini perlunya pemberdayaan nelayan, baik dari segi penguatan kelembagaan keuangan melalui koperasi maupun peningkatan keterampilan pengelolaan hasil tangkapan agar nelayan dapat meningkatkan kualitas produk dan menyesuaikan harga pasar.

Literatur kedua yaitu penelitian yang dilakukan oleh A. Amirah Nursyahbani, Ahmad Chusnul Akram, dan Agussalim Burhanuddin dalam penelitian tersebut yang berjudul *Maritime Potential Analysis for Barru Regency Economic Development*. Dalam tulisannya penulis menganalisis potensi maritim untuk pembangunan ekonomi Kabupaten Barru. Penelitian tersebut penulis mengungkapkan bahwa Kabupaten Barru memiliki potensi maritim yang sangat besar dan berkontribusi signifikan terhadap pembangunan ekonomi daerah. Potensi ekonomi maritim yang dimiliki oleh Kabupaten Barru meliputi sektor perikanan, budidaya hasil laut, dan pariwisata. Pemerintah Kabupaten Barru, melalui Dinas Pariwisata dan Dinas Perikanan, telah berupaya untuk mengembangkan sektor-sektor tersebut guna meningkatkan perekonomian daerah. Peneliti menemukan bahwa aktivitas pantai dan pulau serta kegiatan perikanan seperti budidaya udang dan tiram, memberikan dampak positif bagi pendapatan daerah dan kesejahteraan masyarakat setempat. Selain itu, penulis juga mengungkapkan beberapa kendala yang dihadapi Kabupaten Barru mengelola sumber daya maritimnya seperti kurangnya infrastruktur pendukung pariwisata, aksesibilitas, serta masalah pencemaran dan degradasi lingkungan laut (Nursyahbani, Akram, & Burhanuddin, p. 605-607). Penelitian ini menggarisbawahi betapa pentingnya keberlanjutan dalam pengelolaan sumber daya maritim. Pemanfaatan yang optimal perlu diimbangi dengan upaya pelestarian lingkungan untuk menghindari over-eksploitasi dan memastikan keberlanjutan sumber daya laut. Kendala seperti infrastruktur yang belum memadai, keterbatasan aksesibilitas, dan pencemaran lingkungan laut perlu menjadi perhatian utama dalam strategi pengembangan potensi maritim Kabupaten Barru.

Literatur ketiga yaitu peneliti yang dilakukan oleh Nurfatimah Jafar, Suwarni, dan Moh. Tauhid Umar dalam penelitian mereka yang berjudul *Potensi Reproduksi Ikan*

Kembung Perempuan Yang Didaratkan Di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Sumpang Binangae, Kabupaten Barru. Dalam tulisannya penulis meneliti Tempat Pelelangan ikan di Sumpang Binangae Kabupaten Barru dalam potensinya terhadap reproduksi ikan kembung perempuan. Dalam penelitian tersebut penulis menyelidiki fekunditas (jumlah telur) dan diameter telur ikan kembung perempuan yang didaratkan di tempat pelelangan ikan Sumpang Binangae untuk mengungkap pola pemijahan dan potensi reproduksi ikan tersebut yang penting untuk pengelolaan sumber daya ikan berkelanjutan. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa ikan kembung perempuan memiliki fekunditas antara 2.446 hingga 20.838 butir telur, dengan pola pemijahan *total spawner* yaitu pemijahan yang melepaskan telur matang dengan sekaligus. Hubungan yang kuat antara fekunditas dan bobot ikan mengindikasikan bahwa bobot tubuh adalah indikator penting dalam menilai potensi reproduksi (Jafar, Suwarni, & Umar, p. 175-176). Penelitian ini memberikan wawasan yang berharga untuk mendukung pengelolaan perikanan secara berkelanjutan. Mengetahui fekunditas dan pola pemijahan ikan kembung perempuan menjadi dasar dalam menentukan musim penangkapan yang tepat untuk menghindari penangkapan ikan saat pemijahan. Ini akan membantu menjaga kualitas ikan, menjaga populasi ikan dan mencegah overfishing sehingga terciptanya pertumbuhan ekonomi maritim yang baik bagi Kabupaten Barru.

Berdasarkan literatur diatas sangat terkait dalam penelitian ini. Ketiga literatur tersebut menunjukkan bagaimana tempat pelelangan ikan (TPI) di Kabupaten Barru memiliki peran kunci dalam mendukung ekonomi maritim melalui distribusi hasil laut, terutama ikan kembung perempuan di tempat pelelangan ikan Sumpang Binangae. TPI ini memfasilitasi rantai pasok dari nelayan ke konsumen, sekaligus berpotensi menjadi atraksi wisata yang mendukung sektor pariwisata maritim. Dengan peningkatan infrastruktur dan penguatan kelembagaan nelayan, TPI dapat berkontribusi lebih besar pada pertumbuhan ekonomi maritim di Kabupaten Barru. Dalam hal ini, Penulis akan membahas bagaimana TPI dapat mendorong pertumbuhan ekonomi maritim di Indonesia terutama di Kabupaten Barru.

Penelitian ini akan berfokus pada sektor ekonomi maritim, dimana teori ini dapat membantu memahami bagaimana sektor perikanan dalam hal ini tempat pelelangan ikan dapat berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat serta bagaimana optimalisasi sumber daya kelautan dapat memberikan nilai tambah ekonomi daerah. Penelitian ini akan membahas pendekatan kebijakan terintegrasi di tingkat daerah dan pengaruh infrastruktur & teknologi di TPI terhadap efisiensi ekonomi. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang cenderung menyoroti rantai pasok atau potensi umum tanpa menitikberatkan pada peran kebijakan daerah secara mendetail. Penelitian ini akan menganalisis secara spesifik bagaimana kebijakan

pemerintah daerah dapat dioptimalkan dalam mengelola TPI, termasuk dukungan seperti infrastruktur, pelatihan nelayan, serta integrasi antara TPI dan industri pengolahan ikan, penelitian ini juga meneliti secara detail tentang teknologi yang dapat mempercepat dan memperbaiki proses pelelangan, sekaligus menjaga kualitas hasil tangkapan hingga sampai ke konsumen.

2. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah kualitatif *narrative descriptive* dengan pendekatan kajian literatur dalam mengkaji lebih dalam terkait potensi pelelangan ikan di Kabupaten Barru sebagai upaya dalam mendorong pertumbuhan ekonomi maritim. Dengan metode ini, peneliti bertujuan untuk menjelaskan kebijakan pemerintah Kabupaten Barru dalam mengelola ekonomi maritimnya terkhusus pada tempat pelelangan ikan. Penelitian ini memanfaatkan berbagai sumber literatur, seperti artikel ilmiah, buku, laporan penelitian, dan dokumen kebijakan untuk memahami kebijakan yang ada. Melalui pendekatan naratif, peneliti dapat memberikan konteks lebih mendalam tentang kebijakan pemerintah Kabupaten Barru dalam mengelola tempat pelelangan ikan dengan cara melihat berbagai pandangan dari penelitian sebelumnya.

Fokus utama penelitian ini ialah mencakup dampak kebijakan pemerintah dalam membangun dan mengelola tempat pelelangan ikan terhadap pertumbuhan ekonomi maritim. TPI yang tidak terorganisir dengan baik dapat menjadi masalah dan terjadinya penurunan pertumbuhan ekonomi dalam sektor maritim. Penelitian ini akan mengeksplorasi dampak dari keberadaan TPI sebagai sumber pertumbuhan ekonomi maritim di Indonesia. Dengan memanfaatkan data dari berbagai sumber, penelitian ini diharapkan dapat menggambarkan secara komprehensif tentang bagaimana kebijakan pengelolaan TPI diterapkan dan bagaimana dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia.

3. PEMBAHASAN

Kabupaten Barru merupakan daerah pesisir laut yang membentang luas di provinsi Sulawesi Selatan sehingga Kabupaten tersebut sangat berpotensi untuk meningkatkan ekonomi daerah di sektor kelautan dan perikanan terutama dalam mendukung ekonomi maritim. Wilayah pesisir laut Kabupaten Barru berperan penting dalam mata pencaharian penduduk lokal sehingga Kabupaten tersebut memiliki banyak sumber daya hasil laut dan beragam jenis jasa lingkungan yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan ekonomi Daerah. Berbagai jenis sumber daya laut yang dapat dikelola seperti perikanannya, budidaya

udang, budidaya tiram atau kerang bahkan dapat dikembangkan dalam sektor pariwisata. Wilayah laut yang luas Kabupaten Barru cukup berpotensi untuk dimanfaatkan yakni dengan pengelolaan hasil laut yang berkelanjutan, wilayah laut Kabupaten Barru juga merupakan jalur transportasi utama yang menghubungkan provinsi Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara dan lainnya (Nursyahbani A et al, 2022:605-606) . Pada pembahasan kali ini penulis akan membahas bagaimana Tempat pelelangan ikan (TPI) di Kabupaten Barru berkontribusi dalam mendukung perekonomian lokal begitupun ekonomi maritim, bagaimana kebijakan pemerintah daerah dan bagaimana infrastruktur modern meningkatkan efisiensi dan kualitas hasil pelelangan, tantangan dalam pengelolaan TPI, optimalisasi dan inovasi di TPI, serta apa dampak sosial dan lingkungan terhadap keberadaan TPI.

Kontribusi Tempat Pelelangan Ikan (TPI)

1. Kontribusi pada Pemasaran

A. Peran TPI sebagai pusat distribusi

TPI yang ada di Kabupaten Barru berfungsi sebagai pusat pendaratan dan penjualan ikan dari hasil tangkapan nelayan. Nelayan membawa hasil tangkapannya yang kemudian didistribusikan melalui pedagang pengumpul yang juga merupakan pemilik kapal yang diistilahkan sebagai Punggawa, pedagang kecil, hingga akhirnya sampai ke konsumen. Sistem ini memberikan peluang bagi nelayan untuk menjual ikan dengan lebih terorganisasi. Sebagai contoh salah satu Tempat pelelangan ikan di Kabupaten Barru yaitu TPI Sumpang Binangae dimana nelayan bertindak sebagai pihak utama atau produsen yang melakukan operasi penangkapan ikan yang nantinya akan di daratkan di TPI Sumpang Binangae dan akan dikumpulkan atau disatukan dalam jumlah dan jenis yang lebih banyak oleh pedagang pengumpul yang disebut punggawa sebagai distributor yang akhirnya dijual dan didistribusikan dalam jumlah yang lebih sedikit oleh pedagang kecil yang terdiri dari tiga kelompok, yaitu pedagang lapak, pedagang keliling, dan pedagang yang berasal dari luar daerah Kabupaten Barru.

B. Posisi tawar menawar

Meskipun TPI memfasilitasi penjualan, nelayan seringkali berada pada posisi tawar yang rendah karena harga jual ikan ditentukan oleh punggawa. Hal ini membuat nelayan bergantung pada yang ditetapkan di pasar, bukan oleh mereka sendiri. Contoh kasus seperti ini mengenai model rantai pasok di PPI Paotere Kota

Makassar dimana nelayan penangkap tidak memiliki hak atau kemampuan harga jual ikan dan memilih konsumen. Penelitian tersebut menuliskan bahwa nelayan memiliki posisi tawar menawar yang lemah terhadap hasil tangkapan mereka sendiri (Ghaffar, M.A. et all, 2020).

C. Penciptaan Lapangan Kerja

Aktivitas di Tempat pelengan ikan melibatkan beberapa pihak dalam rantai pasok, sehingga menciptakan peluang kerja bagi:

- a) **Nelayan**, sebagai pemasok utama hasil tangkapan.
- b) **Pedagang pengumpul**, berfungsi sebagai distributor yang mengelola ikan dari nelayan untuk dijual kepada pedagang kecil.
- c) **Pedagang kecil**, termasuk pedagang lapak yang menjual hasil tangkapannya dan melayani pembeli di TPI , pedagang keliling yang menjual hasil tangkapannya dari rumah ke rumah konsumen, dan pedagang dari luar daerah.
- d) **Pekerja TPI lainnya**, seperti pekerja penyimpanan, pengangkutan, dan logistik.

Efek Multiplier pada sektor pendukung :

- Industri pengolahan ikan misalnya, pengolahan ikan asin atau olahan beku untuk pasar luar daerah.
- Transportasi dan logistik, aktivitas seperti pengangkutan ikan ke daerah lain menciptakan peluang kerja tambahan.
- Penyediaan alat tangkap dan bahan bakar, seperti penyedia fasilitas seperti SPBN (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan) dan alat tangkap seperti jaring dan perahu yang sangat penting untuk menunjang kegiatan melaut, dan tempat penyimpanan es yang dimana permintaan akan es untuk penyimpanan ikan bisa menciptakan peluang usaha bagi penyedia es curah di sekitar TPI.

D. Stabilitas Harga Ikan

- Sistem penepatan harga di TPI

Harga ikan di TPI Kabupaten Barru cenderung ditentukan oleh pedagang pengumpul (punggawa). Sistem ini memastikan harga ikan relatif stabil di lingkungan TPI, sehingga menghindari persaingan langsung antara nelayan dan pembeli akhir. Namun, stabilitas harga ini seringkali menguntungkan pedagang dibandingkan nelayan. Contohnya pada TPI

Sumpang Binangae dimana nelayan menghadapi permasalahan seperti tidak tersedianya modal usaha untuk melakukan kegiatan penangkapan ikan dan persamasalahan seperti cuaca dan waktu penangkapan yang tidak mendukung.

- Upaya pengelolaan pasokan

1. Pengelolaan hasil tangkapan berlebih

Pentingnya pelatihan dan diversifikasi produk untuk mengatasi kelebihan pasokan ikan yang dapat menyebabkan penurunan harga, ikan seringkali disimpan atau diolah menjadi produk tahan lama seperti ikan asin. Hal ini dapat membantu membuka peluang ekonomi baru terutama bagi pelaku usaha kecil dan menengah yang dimana Kabupaten Barru sendiri mendorong UMKM sebagai faktor ekonominya.

2. Penerapan rantai dingin

Penyimpanan dengan es atau teknologi pendingin dapat membantu mempertahankan kualitas ikan, sehingga dapat dijual dengan harga yang stabil.

E. Dampak pada pasar lokal dan regional

Stabilitas harga di tempat pelelangan ikan di Kabupaten Barru tidak hanya menguntungkan konsumen lokal tetapi juga pedagang dan konsumen dari luar daerah, hal ini juga menciptakan kebutuhan transportasi untuk mengangkut ikan dari TPI ke pasar lokal, regional, atau bahkan antarprovinsi. Transportasi laut juga berperan penting dalam mendukung operasional nelayan. Ketersediaan fasilitas seperti dermaga atau akses ke pelabuhan turut mendukung keberlanjutan sektor Transportasi laut maupun darat.

Salah satu contoh tempat pelelangan ikan yang ada di Kabupaten Barru seperti TPI Sumpang Binangae yang dimana pedagang dan konsumen dari luar seperti Pare-pare, Pangkep, dan Makassar sering membeli ikan dalam jumlah besar. Disini dapat kita lihat bagaimana sektor perikanan tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi daerah saja tetapi juga daerah lain sehingga juga menjadikan sektor perikanan sebagai salah satu faktor pendorong ekonomi maritim.

Kebijakan dan Infrastruktur

1. Peran Kebijakan Pemerintah Daerah

- Regulasi dan kebijakan tata kelola

Pemerintah daerah memiliki tanggung jawab dalam memastikan operasional berjalan dengan baik dan lancar sesuai dengan regulasi, seperti pengelolaan rantai pasok, penepatan zonasi, dan pemeberian izin usaha bagi nelayan. Contoh kebijakan yang ada TPI Sumpang Binangae terkait pemasaran, misalnya memastikan nelayan tidak menjual ikan langsung ke konsumen untuk menjaga stabilitas harga di lingkungan TPI. Sistem ini menjelaskan bagaimana semua pihak dalam rantai pasok mendapatkan keuntungan meskipun posisi tawar menawar rendah. Contoh lain bagaimana pemerintah daerah turut mendukung ekonomi di sektor ini, seperti ketua komisi II DPRD Kabupaten Barru Rusdi, yang melakukan proyek pembangunan TPI baru di Desa Siddo Kecamatan Balusu. Tidak hanya itu Rusdi juga secara langsung turun di lapangan untuk mengecek perkembangan pembangunan TPI ini. Jumlah anggaran yang dikeluarkan untuk pembanguana TPI ini yaitu sekitar Rp82.824.000 yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU). Proyek TPI ini ditender oleh Duta Pribumi dengan jangka waktu kerja 60 hari, terhitung sejak 13 Oktober hingga 11 Desember 2021. Dinas Perikanan Pemerintah Kabupaten Barru, Hendra menjelaskan bahwapembangunan TPI ini disebabkan kondisi TPI sebelumnya sudah tidak memungkinkan, sehingga hadirnya TPI yang baru dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dengan nyaman (Tribun-Timur.com, 2022).

- Pengawasan Kualitas dan Legalitas

Pemerintah daerah bertanggung jawab memastikan kualitas hasil tangkapan yang diperdagangkan di TPI sesuai dengan standar kesehatan dan keamanan pangan. Kebijakan ini mencakup pengawasan sanitasi di lokasi TPI, penanganan hasil tangkapan dengan sistem rantai dingin, dan penegakan regulasi terhadap aktivitas ilegal, seperti penangkapan ikan di area terlarang.

- Edukasi dan Pelatihan

Pemerintah mengadakan pelatihan bagi nelayan untuk meningkatkan teknik penangkapan, pengelolaan hasil tangkapan, dan penanganan ikan yang higienis, hal ini tidak lain bertujuan untuk mempertahankan kualitas produk dan meningkatkan daya saing pasar. Tidak hanya itu pelatihan diversifikasi

produk juga penting bagi nelayan dimana nelayan diajarkan bagaimana cara mengolah ikan menjadi produk bernilai tambah seperti abon, ikan asin, atau makanan olahan lainnya yang dimana akan membantu nelayan mendapatkan pendapatan tambahan saat panen berlimpah.

2. Pentingnya Infrastruktur Modern

a. Peningkatan Kualitas Hasil Tangkapan

- Penyimpanan Dingin (Cold Storage)

Fasilitas penyimpanan dingin membantu menjaga kualitas ikan, terutama saat hasil tangkapan melimpah. Penyimpanan ini memungkinkan ikan yang tidak terjual segera untuk disimpan hingga keesokan harinya tanpa kehilangan kualitas. Teknologi ini juga memperpanjang masa simpan ikan sehingga memudahkan distribusi pasar ke pasar yang lebih jauh.

- Peningkatan Higienitas

Dengan infrastruktur modern seperti tempat pencucian ikan yang higienis dan sistem sanitasi yang memadai kualitas produk dapat terjamin dan terjaga sesuai dengan standar keamanan pangan, hal ini tentu saja penting untuk menjangkau pasar nasional dan lebih luas lagi bisa menjangkau pasar internasional.

b. Efisiensi Operasional

- SPBN (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan)

SPBN memudahkan nelayan untuk mendapatkan bahan bakar dengan harga subsidi, memungkinkan mereka memperluas jangkauan penangkapan hingga perairan yang lebih produktif. Tanpa fasilitas ini, nelayan sering bersaing di *fishing ground* yang sempit, yang dapat mengurangi hasil tangkapan.

- Dermaga Modern

Dermaga yang memadai mempercepat proses bongkar muat hasil tangkapan dan mengurangi risiko kerusakan ikan. Dermaga juga pengangkutan ikan dalam jumlah besar ke *cold storage* atau langsung ke pasar.

c. Teknologi Digital

- Sistem Lelang Elektronik

Dengan sistem lelang berbasis elektronik ini proses pelelangan menjadi lebih transparan, efisien, dan adil. Nelayan dapat mengetahui harga pasar

secara *real-time*, sehingga mereka memiliki kontrol lebih besar atas hasil tangkapan.

- Manajemen Data

Teknologi digital dapat digunakan untuk mencatat jumlah jenis, dan harga ikan yang dilelang, memudahkan pelaporan dan analisis pasar

Tantangan dalam Pengelolaan TPI

Di balik dari perkembangan TPI yang dapat mendukung pertumbuhan ekonomi maritim, adapun tantangan yang harus dihadapi. Tantangan ini pastinya melibatkan berbagai faktor yang akan membuat aktivitas di TPI tidak berjalan lancar, terkhusus pada tempat pelelangan ikan yang ada di Kabupaten Barru. Ada beberapa tantangan dan dampaknya terhadap efektivitas TPI sebagai pendorong ekonomi maritim:

1. Kurangnya Infrastruktur

a. Minimnya fasilitas penyimpanan dingin

Tidak adanya *cold storage* yang memadai mengurangi kemampuan nelayan untuk menyimpan ikan segar yang tidak terjual. Hal ini sering menyebabkan penurunan kualitas dan nilai jual hasil tangkapan.

b. Keterbatasan SPBN

Nelayan yang ada di TPI Kabupaten Barru contohnya TPI Sumpang Binangae dimana mereka sering menghadapi kesulitan dalam mengakses bahan bakar untuk operasional kapal mereka. Hal ini membatasi jangkauan *fishing ground*, yang menyebabkan nelayan bersaing di daerah yang sama.

c. Kurangnya Fasilitas Dermaga Modern

Dermaga yang tidak memadai membuat proses bongkar muat ikan memakan waktu lebih lama, yang dimana dapat memengaruhi kualitas hasil tangkapan terutama pada musim panen besar.

Dampak dari tantangan tersebut yaitu; Efisiensi yang rendah, dimana minimnya infrastruktur menyebabkan nelayan dan pedagang tidak dapat beroperasi secara efisien, sehingga mengurangi potensi keuntungan, selanjutnya hilangnya potensi pasar, ketidakmampuan menyimpan hasil tangkapan yang berlebih memaksa nelayan menjual ikan dengan harga rendah, atau bahkan membuang hasil tangkapannya yang tidak habis terjual.

2. Lemahnya Daya Tawar Nelayan

Sistem pemasaran di TPI yang ada di Kabupaten Barru salah satunya TPI Sumpang Binangae sangat bergantung pada punggawa, yang dimana punggawa bertindak sebagai pengumpul dan penentu harga hasil tangkapan. Posisi tawar nelayan yang lemah menyebabkan mereka tidak mendapatkan harga yang adil untuk ikan mereka. Nelayan juga dilarang menjual langsung ke konsumen, sehingga pendapatan mereka bergantung pada harga yang ditetapkan oleh pedagang pengumpul. Hal diatas menunjukkan dampak pada nelayan salah satunya ketidakadilan ekonomi, nelayan mendapatkan pendapatan yang rendah dibandingkan dengan pedagang atau pengecer, meskipun mereka adalah pihak yang paling terlibat dalam menghasilkan hasil tangkapan, dan ketergantungan pada punggawa yang menciptakan situasi dimana nelayan tidak memiliki kendali atas hasil kerja mereka.

3. Isu Keberlanjutan

Sebagian besar kawasan pesisir di Kabupaten Barru tidak dimanfaatkan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Contohnya seperti pembangunan di jalur hijau pesisir dapat merusak ekosistem yang penting bagi keberlanjutan sumber daya laut. Hambatan lain seperti masih rendahnya kesadaran masyarakat pesisir tentang pentingnya menjaga kelestarian ekosistem laut dan pesisir menjadi tantangan serius. Dampak yang terjadi dari hal ini yaitu ketidaksesuaian pemanfaatan lahan yang dapat menyebabkan kerusakan habitat laut, seperti terumbu karang dan mangrove yang berdampak negatif pada populasi ikan. Penurunan ketersediaan ikan juga berdampak pada isu keberlanjutan ini, tanpa keberlanjutan hasil tangkapan akan terus menurun dan yang pada akhirnya mengurangi pendapatan nelayan dan efektivitas TPI sebagai pusat ekonomi.

4. Ancaman Overfishing

Kompetisi yang tinggi di *fishing ground* yang sama menyebabkan eksploitasi sumber daya ikan tanpa memperhatikan musim tangkap atau ukuran ikan. Pemerintah daerah juga belum sepenuhnya mampu menerapkan dan mengawasi kebijakan perikanan berkelanjutan di kawasan ini. Dampak dari hambatan ini seperti overfishing yang mengancam populasi ikan, dimana ini akan memengaruhi hasil tangkapan di masa depan. Penurunan stok ikan juga membuat nelayan semakin bergantung pada hasil yang kecil, sementara permintaan pasar tetap tinggi.

Faktor-Faktor yang Memengaruhi Efektivitas TPI

1. Efisiensi Operasional Berkurang
Kurangnya infrastruktur modern seperti SPBN, *cold storage*, dan dermaga yang memadai membuat TPI sulit berfungsi secara maksimal yang dapat mengurangi efektivitasnya sebagai pusat distribusi hasil laut.
2. Pendapatan Nelayan Yang Terbatas
Posisi tawar nelayan yang lemah dikombinasikan dengan ketergantungan pada punggawa membuat mereka tidak mendapatkan keuntungan optimal dari hasil tangkapan. Hal ini menghambat TPI menjadi motor penggerak ekonomi maritim.
3. Keberlanjutan Jangka Panjang Terancam
Isu keberlanjutan dan *overfishing* tidak hanya mengancam ekosistem tetapi juga mengurangi potensi jangka panjang TPI sebagai pusat ekonomi berbasis maritim.

Dampak Sosial Terhadap Keberadaan TPI

1. Pengentasan Kemiskinan
Keberadaan TPI yang ada di Kabupaten Barru menciptakan ekosistem ekonomi yang melibat banyak termasuk nelayan, pedagang pengumpul (Punggawa), pedangan kecil seperti pedagang lapak dan keliling, dan juga pekerja pendukung lainnya seperti pengangkut ikan, penyortir, dll. Aktivitas ini memberikan penghasilan langsung bagi ribuan individu di sekitar kawasan TPI. Selain itu, pekerjaan musiman seperti selama musim panen ikan juga membantu masyarakat mendapatkan penghasilan tambahan.
2. Dampak pada Pendapatan Keluarga Nelayan
Dengan adanya pasar yang terorganisasi di TPI, nelayan memiliki peluang lebih besar untuk menjual hasil tangkapan mereka. Meskipun daya tawar nelayan yang masih lama karena ketergantungannya kepada punggawa pendapatan mereka lebih stabil dibandingkan jika menjual langsung tanpa struktur pasar. Selain dampak langsung dari TPI yang dapat kita lihat, TPI juga memengaruhi sektor lain secara tidak langsung seperti penyediaan es, bahan bakar, dan alat tangkap yang menciptakan rantai nilai ekonomi yang lebih besar, peluang usaha lainnya yang bisa kita lihat juga seperti penyedia bahan bakar (SPBN) atau usaha transportasi hasil laut.

3. Peningkatan Pendidikan Masyarakat Pesisir

Dengan penghasilan yang lebih terjamin dari efektivitas TPI, keluarga nelayan memiliki kemampuan lebih baik untuk menyekolahkan anak-anak mereka hingga ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Pendidikan yang lebih baik membuka peluang kerja di sektor lain yang akhirnya membantu memutus lingkaran kemiskinan. Pemerintah daerah dan organisasi non-pemerintah sering mengadakan pelatihan untuk nelayan dimana mereka diajarkan bagaimana teknik penangkapan yang efisien, membangun usaha kecil, dan bagaimana mengolah limbah dan diversifikasi produk untuk menciptakan nilai tambah dari hasil tangkapan. Pendidikan tentang pentingnya menjaga ekosistem laut seperti rehabilitasi mangrove dan larangan penangkapan ikan tertentu selama musim pemijahan, hal ini diajarkan kepada mereka untuk bagaimana memastikan keberlanjutan ekosistem dan hasil tangkapan jangka panjang.

4. Penguatan Komunitas Lokal

Posisi nelayan yang lemah dalam hal tawaran yang rendah dapat terorganisir melewati komunitas nelayan untuk bekerja secara kolektif, seperti membeli alat tangkap atau menjual hasil tangkapan dengan daya tawar yang lebih tinggi. Hal ini memperkuat solidaritas masyarakat pesisir. Contohnya seperti menawarkan pinjaman modal dengan bunga rendah kepada nelayan. Selain itu, komunitas lain yang terlibat dalam pengolahan hasil laut seperti komunitas Perempuan dapat membuat olahan seperti ikan asin atau abon ikan. Hal ini memberikan kontribusi langsung terhadap ekonomi keluarga sekaligus memperkuat peran perempuan dalam masyarakat.

Dampak Lingkungan Terhadap Keberadaan TPI

1. Tekanan pada Ekosistem Laut

Aktivitas intensif di TPI untuk memenuhi permintaan pasar yang meningkatkan risiko penangkapan berlebih, terutama untuk ikan pelagis kecil seperti tongkol dan kembung. Nelayan yang menggunakan alat tangkap deskrtif atau tidak selektif, seperti pukat harimau yang dapat merusak populasi ikan dan ekosistem laut. Alat tangkap yang merusak, seperti jaring yang menyeret dasar laut dapat mengancam habitat penting seperti terumbu karang dan padang lamun. Dampak ini juga menyebabkan penurunan spesies target dan hasil tangkapan yang tidak berkelanjutan di masa depan.

2. Pencemaran dari Aktivitas di TPI

Limbah organik seperti sisa ikan seperti kepala, tulang, dan bagian lainnya seringkali dibuang sembarangan yang dapat mencemari perairan pesisir dan menyebabkan penurunan kualitas air. Limbah yang tidak dikelola dengan baik dapat memengaruhi kesehatan masyarakat pesisir. Hal ini pastinya membutuhkan fasilitas pengelolaan limbah cair dan padat untuk mencegah pencemaran lingkungan.

3. Penerapan Kebijakan Perikanan Berkelanjutan

Pemerintah daerah harus menerapkan zonasi yang jelas untuk melarang penangkapan di area pemijahan ikan atau kawasan konservasi. Hal ini tentunya penting untuk memastikan regenerasi stok ikan di masa depan. Penggunaan alat tangkap ramah lingkungan juga penting untuk mendorong nelayan untuk menggunakan alat tangkap yang selektif, seperti jaring dengan ukuran mata jaring yang sesuai, dapat mengurangi dampak negatif terhadap spesies non-target.

4. Rehabilitasi Ekosistem

Salah satu cara mengrehabilitasi ekosistem dengan rehabilitasi mangrove dan restorasi terumbu karang. Mangrove merupakan habitat penting untuk ikan kecil dan spesies ikan kecil dan spesies laut lainnya. Rehabilitasi mangrove di kawasan pesisir Kabupaten Barru dapat meningkatkan keanekaragaman hayati dan melindungi wilayah dari abrasi, penanaman terumbu karang buatan juga dapat menjadi solusi untuk memperbaiki habitat yang rusak akibat aktivitas perikanan intensif.

5. Diversifikasi Mata Pencaharian

Diversifikasi mata pencaharian seperti budidaya rumput laut, kerang, atau udang dapat mengurangi tekanan pada stok ikan liar. Kabupaten Barru sendiri terkenal dengan pengelolaan perikananannya seperti tiram dan udang, dimana sampai sekarang tiram menjadi tujuan wisata kuliner. Hal ini juga merupakan bukti keberhasilan Kabupaten Barru dalam mengelola ekonomi maritimnya. Edukasi tentang pentingnya menjaga sumber daya laut juga membantu masyarakat memahami hubungan antara keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan mereka.

Potensi pelelangan ikan di Kabupaten Barru sebagai upaya dalam mendorong pertumbuhan ekonomi maritim penting untuk merujuk pada kerangka konseptual yang relevan, seperti teori ekonomi maritim dan model pembangunan berkelanjutan. Teori ekonomi maritim menekankan peran sektor kelautan dalam perekonomian lokal, sehingga Kabupaten Barru dengan sumber daya perikanan yang melimpah berkontribusi dalam

mengembangkan sektor ini sebagai motor penggerak ekonomi. Pelelangan ikan berfungsi tidak hanya sebagai tempat transaksi, tetapi juga sebagai pusat distribusi yang dapat meningkatkan nilai tambah produk perikanan. Dengan memanfaatkan teknologi informasi dan sistem pemasaran yang efisien nelayan dapat menjangkau pasar yang lebih luas, sehingga meningkatkan pendapatan mereka. Selain itu, penerapan model berkelanjutan menjadi kunci dalam pengelolaan sumber daya perikanan dimana praktik penangkapan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan harus diterapkan.

Pengawasan yang ketat terhadap kuota tangkapan dan penerapan metode penangkapan yang tidak merusak ekosistem dapat meningkatkan produktivitas jangka panjang dan kesejahteraan masyarakat pesisir. Dari perspektif sosial pelelangan ikan dapat memperkuat komunitas nelayan dengan menciptakan sistem yang transparan, sehingga nelayan merasa lebih dihargai dan memiliki kepastian dalam menjual hasil tangkapan mereka. Penulis berpendapat bahwa untuk memaksimalkan potensi pelelangan ikan di Kabupaten Barru perlu adanya kolaborasi antara pemerintah, nelayan, dan lembaga penelitian. Pemerintah harus menyediakan pelatihan dan edukasi tentang praktik penangkapan yang berkelanjutan, sementara lembaga penelitian dapat memberikan data dan analisis yang diperlukan untuk pengambilan keputusan yang tepat. Dengan pendekatan kolaboratif ini diharapkan pelelangan ikan tidak hanya menjadi sumber pendapatan saja, tetapi juga berkontribusi pada pelestarian lingkungan dan kesejahteraan masyarakat. Kabupaten Barru dalam hal ini potensi pelelangan ikannya sangat berkontribusi dalam menyokong ekonomi daerah dan menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi maritim, dengan penerapan kerangka konseptual yang tepat dan melibatkan semua pemangku kepentingan.

4. KESIMPULAN

Kabupaten Barru memiliki potensi besar dalam sektor ekonomi maritim, khususnya melalui pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) yang efektif. TPI berperan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dengan menyediakan pasar yang terorganisir bagi nelayan untuk menjual hasil tangkapannya. Pemerintah daerah juga memainkan peran kunci dalam pengembangan infrastruktur dan kebijakan yang mendukung pengelolaan TPI, termasuk pelatihan bagi nelayan dan peningkatan fasilitas penyimpanan serta distribusi hasil laut. Tentunya dalam mendorong ekonomi maritim melalui TPI ini tidak berjalan lancar, karena pastinya ada tantangan yang harus dilewati, seperti kurangnya infrastruktur yang memadai, lemahnya posisi tawar nelayan, dan isu keberlanjutan sumber daya laut perlu

segera diatasi untuk memastikan manfaat ekonomi jangka panjang dan keberlanjutan sektor perikanan di Kabupaten Barru.

Pengembangan TPI yang berkelanjutan, diiringi dengan kebijakan yang mendukung keberlanjutan ekosistem laut akan memperkuat posisi Kabupaten Barru sebagai motor penggerak ekonomi maritim di Indonesia. Oleh karena itu, kolaborasi antara pemerintah, nelayan, dan sektor swasta sangat penting untuk menciptakan ekosistem perikanan yang lebih efisien, adil, dan berkelanjutan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir dan menjaga kelestarian sumber daya laut.

SARAN

Dari penelitian ini, penulis berharap pemerintah Kabupaten Barru dapat mengembangkan potensi ekonominya dalam hal ini pelelangan ikan dengan memfasilitasi seluruh pelaku usaha dalam lingkup ini terutama nelayan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi maritim.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustina. (2022). Pemetaan daerah potensial penangkapan ikan berbasis sistem informasi geografis di perairan Barru, Pare-Pare, dan Pinrang. *Sains dan Teknologi Perikanan*.
- Amirah Nursyahbani, A. C. (2022). Maritime potential for Barru Regency economic development. *Meraja Journal*.
- Darullah. (2022). Komisi II DPRD Barru sidak proyek pembangunan TPI Siddo. *Tribun Barru.com*. <https://makassar.tribunnews.com/2022/04/20/komisi-ii-dprd-barru-sidak-proyek-pembangunan-tpi-siddo>
- Gunawan, A. A. (2022). Peningkatan ekonomi masyarakat berbasis budidaya ikan nila inovasi bioflok di Desa Lipukasi Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru. *LPPM STIKOM Tunas Bangsa*.
- Herlina Amriana, D. P. (2022). Fisherman's response to fishing equipment assistance program by local government in Lasitae village, Tanete sub-district, Rilau, Barru district. *Meraja Journal*.
- Husni Mubarak, A. S. (2024). Pengembangan wilayah pesisir berkelanjutan di kawasan pesisir Kecamatan Barru Kabupaten Barru. *PBUP*.
- Indonesia, K. K. (2022, April 6). KKP perbarui data estimasi potensi ikan, totalnya 12,01 juta ton per tahun. *KKP*. <https://kkp.go.id/news/news-detail/kkp-perbarui-data-estimasi-potensi-ikan-totalnya-1201-juta-ton-per-tahun65c1b1dfcd9b1.html>

- Mukhlisa A. Ghaffar, E. d. (2022). Analisis rantai pasok hasil tangkapan di tempat pendaratan ikan (TPI) Sumpang Binangae Kecamatan Barru Kabupaten Barru. Semnas Politani Pangkep.
- Nurfatihah Jafar, S. M. (2019). Potensi reproduksi ikan kembung perempuan yang didaratkan di tempat pelelangan ikan (TPI) Sumpang Binangae, Kabupaten Barru. Sains dan Teknologi Perikanan.
- Nurlaylah, A. I. (2016). Peningkatan kualitas air bersih dan diversifikasi olahan ikan pada masyarakat pesisir Kabupaten Barru. Dinamika Pengabdian.
- Putri, A. S. (2020). Potensi sumber daya alam lautan. Kompas.com. <https://www.kompas.com/skola/read/2020/05/29/090000069/potensi-sumber-daya-alam-lautan?page=all>
- Saksono, H. (2013). Ekonomi biru: Solusi pembangunan daerah berciri kepulauan studi kasus Kabupaten Kepulauan Anambas. Bina Praja.
- Syaiful, M. (2020). Strategi penghidupan nelayan pedagang di tempat pelelangan ikan (Lelong). Sign Journal of Social Science.